



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 13-21

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang

Irvan Arif Kurniawan^{1✉}, Machrunnisa², Nur Ariza Firna³

Universitas Islam Syekh-Yusuf

Email: 1901010103@students.unis.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dalam upaya mengendalikan dampak perubahan iklim mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim). Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi, membentuk kampung iklim sebagai bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemahaman terkait perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Salah satu ProKlim yang terdapat di Kota Tangerang adalah Kampung Sirih yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dalam pelaksanaan ProKlim di kampung sirih, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi dalam aspek Corporate Social Responsibility (CSR) turut serta mendukung dalam ProKlim dengan memberikan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dengan teori Ansell dan Gash (2007) dalam pelaksanaan program kampung iklim di Kampung sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi yang dilakukan oleh stakeholder mampu mendukung keberlanjutan dan produktivitas pada ProKlim Kampung Sirih, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, ProKlim*

Abstract

The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) of the Republic of Indonesia, in an effort to control the impacts of climate change, issued Minister of Environment Regulation Number 84 of 2016 concerning the Climate Village Program (ProKlim). The Tangerang City Government, through the Environmental Service (DLH), as an effort to mitigate and adapt, has formed climate villages as a form of environmental protection and management, as well as increasing understanding regarding climate change and its impacts. One of the ProKlims in Tangerang City is Sirih Village which is located in Mekarsari Village, Neglasari District, Tangerang City. In implementing ProKlim in the betel village, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi in the aspect of Corporate Social Responsibility (CSR) participated in supporting ProKlim by providing supporting facilities in the form of necessary facilities and infrastructure. This research aims to describe and analyze collaborative governance using the theory of Ansell and Gash (2007) in the implementation of the climate village program in Kampung Sirih, Mekarsari Village, Tangerang City. The research method used is a descriptive qualitative approach. The research results show that the synergy carried out by stakeholders is able to support sustainability and productivity at ProKlim Kampung Sirih, Mekarsari Village, Neglasari District, Tangerang City.

Keywords: *Collaborative Governance, ProKlim*

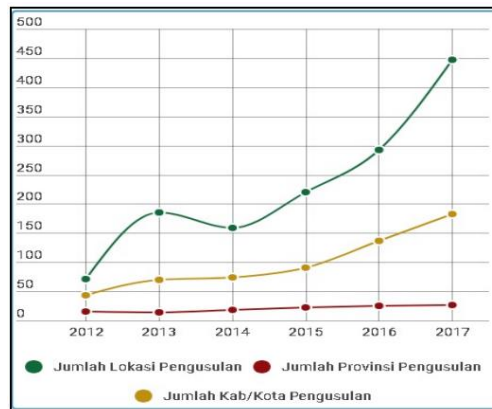
PENDAHULUAN

Governance secara umum dapat dipahami sebagai bentuk peralihan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah saja, tetapi melibatkan aktor lain untuk ikut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya. Dalam dua dekade terakhir, terdapat strategi baru dari salah satu bentuk *governance*, yakni *collaborative governance*. Istilah *collaborative governance* didefinisikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash : 2007).

Melalui model *collaborative governance*, model kerja sama kelembagaan tidak lagi semata-mata bergantung pada peran pemerintah; tetapi juga bergantung pada partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan organisasi non pemerintah (Nugroho & Hilman, 2020). Emerson dan Nabatchi (2015) juga mengungkapkan bahwa kemitraan publik-swasta atau kolaborasi swasta antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah termasuk dalam tata kelola kolaboratif.

Salah satu bentuk penerapan *collaborative governance* adalah kolaborasi *stakeholder* melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dalam program kampung iklim (ProKlim). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. ProKlim merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) yang bertujuan untuk menangani perubahan iklim. ProKlim menggabungkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahap awal dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak pendukung, termasuk pemerintah nasional dan lokal, sektor bisnis, yang melibatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perguruan tinggi, dan organisasi nonpemerintah (Roadmap ProKlim, 2017).



Gambar 1. Grafik jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang mengikuti kegiatan ProKlim di Indonesia

Pelaksanaan ProKlim di Indonesia telah berlangsung selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2012. Dalam kurun waktu 2015-2017, jumlah Kabupaten/Kota yang ikut serta dalam kegiatan ProKlim meningkat dari tahun ke tahun (Roadmap ProKlim, 2017). Di Indonesia, sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, serta gubernur, bupati, dan walikota, telah menetapkan undang-undang atau peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan program ProKlim sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Program Terpadu Iklim Kampung sebagai bentuk dorongan kuat pemerintah daerah terhadap pelaksanaan ProKlim. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi, membentuk kampung iklim sebagai bentuk kesadaran yang lebih besar tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan, serta langkah-langkah untuk mengatur dan melindungi lingkungan sekitar. Salah satu ProKlim yang ada di Kota Tangerang adalah adalah Kampung Sirih yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

PT Pertamina Patra Niaga Soekarno Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI) selaku badan usaha turut serta dalam mendukung program kampung iklim di Kampung Sirih, yaitu dengan melakukan pembinaan dan memfasilitasi infrastruktur

pendukung sarana dan prasarana dalam ProKlim di kampung sirih sebagai upaya bersama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ProKlim merupakan kegiatan berbasis komunitas pada tingkat tapak yang berkelanjutan sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ProKlim (Roadmap ProKlim, 2017). Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi ProKlim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkatan awal juga salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.

Oleh karena itu, faktor penghambat adanya penurunan pemeliharaan lingkungan yang sudah terbangun dapat diatasi dengan sinergi kolaborasi yang dilakukan oleh oleh para *stakeholder* melalui program kampung iklim di kampung sirih, Kelurahan Mekarsari, Kota Tangerang diharapkan dapat keberlanjutan ProKlim tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti referensi buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Kelurahan Mekarsari, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi, dan pengelola kampung sirih di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. Proses yang dilakukan dapat melalui kolaborasi yang melibatkan *stakeholder* di dalamnya. Secara teoritis dalam Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* terdapat 5 indikator, di antaranya kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*) adalah empat

indikator utama. Indikator proses kolaborasi ini terbagi menjadi sub-indikator kecil yaitu dialog tatap muka (*face to face dialogue*), Membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*share understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. tercipta karena adanya peluang yang ada di lingkungan tersebut untuk dikembangkan dan dikelola. Dalam ProKlim tersebut terdapat peran badan usaha dalam hal ini PT Pertamina Pata Niaga Shafthi berkontribusi dalam program kampung iklim kampung sirih sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dan sosial lingkungan (TJSL). Hal tersebut sudah sesuai jika dikaitkan dengan indikator kondisi awal yang mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, yaitu terdapat kondisi di mana dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam kerja sama antara kepentingan, dan antara lembaga atau organisasi dengan *stakeholder*.

Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. memiliki aturan dasar yang jelas dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Program Terpadu Kampung Iklim.

Sebagai dukungan keberlanjutan dalam ProKlim salah satu badan usaha yang mengimplementasikan program CSR dalam ProKlim adalah PT Pertamina Patra Niaga Shafthi yang dilatarbelakangi oleh Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam menjalankan kolaborasi tersebut telah sesuai dengan indikator desain kelembagaan, yakni dalam sebuah proses kolaborasi aturan dasar sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi.

Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan Fasilitatif *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. didukung oleh sinegitas dari berbagi aktor serta peran dari *local hero* dalam hal ini ketua RW 03 sebagai penghubung jalannya kolaborasi. Peran dari masing-masing *stakeholder* sangat diperlukan

untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang terjadi dengan berperan untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam kolaborasi. Dengan demikian, hal tersebut sudah tercapai dalam indikator kepemimpinan fasilitatif yang merupakan komponen kunci dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka ke negosiasi dan negosiasi untuk menghindari masalah yang mungkin berkembang sepanjang proses kolaborasi.

Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Dalam hal ini proses kolaborasi yang dilakukan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Dialog tatap muka dengan melakukan komunikasi secara langsung, yaitu dengan menyatukan perbedaan masing-masing pemahaman dengan mengumpulkan apresiasi mereka, dengan mengetahui sudah sejauh mana program itu berjalan, apa saja kendala dan kekurangannya, lalu mengevaluasi program tersebut untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya serta menjadi pandangan untuk program selanjutnya yang akan dijalankan. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai dengan teori dialog tatap muka bahwa untuk mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dalam memperoleh keadaan saling menguntungkan.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Proses kolaborasi tidak hanya sekedar negosiasi saja tetapi juga bagaimana cara membangun kepercayaan dan komitmen di antara para aktor kolaborasi. Dalam pelaksanaan indikator membangun kepercayaan pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini dengan memahami peran masing-masing. Upaya kolaborasi untuk membangun kepercayaan juga nyata dalam tanggung jawab para aktor telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjukkan hasil dan perjuangan yang telah dicapai, proses, hasil, dan pencapaian yang positif dari adanya kolaborasi tersebut. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai dengan indikator membangun kepercayaan bahwa para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, sehingga para aktor tidak lagi khawatir dengan kolaborasi yang dilaksanakan tidak sia-sia karena memberikan dampak yang positif bagi pondasi dalam berkolaborasi.

3. Komitmen pada proses (*commitment to process*)

Komitmen pada proses terlihat dari adanya kesadaran bahwa para aktor saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada agar selalu tercipta keberlanjutan (*sustainable*) dalam proses kolaborasi ini. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai dengan indikator komitmen pada proses di mana adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan kemungkinan besar akan memperkuat keinginan untuk bekerja sama.

4. Berbagi pemahaman (*share understanding*)

Di dalam fase Berbagi pemahaman (*share understanding*), para aktor perlu membangun pemahaman bersama dengan cara membangun tujuan dan misi yang jelas. Proses *collaborative governance* dapat berjalan apabila para aktor memiliki pemahaman yang sama. Berbagi pemahaman oleh para aktor sudah diberikan pemahaman terkait fasilitas CSR yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Shafthi yang diberikan dalam bentuk fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait ProKlim kampung sirih tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan adanya keberlanjutan (*sustainable*) dan konsisten untuk menjaga kepercayaan dan kerja sama. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai indikator berbagi pemahaman bahwa adanya tujuan bersama yang jelas, karakterisasi bersama yang berbeda dari tantangan yang dihadapi bersama

5. Hasil sementara (*intermediate outcomes*)

Hasil sementara sudah terlihat dari adanya peningkatan pengembangan dan pengelolaan dalam ProKlim kampung sirih tersebut. Terlihat dari adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bentuk pembuatan galeri dan rumah produksi yang bernama "IBU KOS" (Industri Binaan UMKM Kreasi Olahan Sirih), pengembangan inovasi produk, dan kondisi kampung sirih sudah tertata dan terkelola dengan baik lingkungan menjadi nyaman, hijau dan bersih. Kemampuan untuk membangun jejaring kerja dengan pihak eksternal yang dapat mendukung keberlanjutan program, dan penerapan nilai-nilai tradisional yang mendukung upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim sudah terlaksana. Hal tersebut telah sejalan dengan indikator hasil sementara di mana terdapat hasil (pertengahan) dari proses kolaborasi tersebut yang telah dilakukan oleh sinergi para *stakeholder*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang melibatkan *stakeholder*, Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Mekarsari, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi, dan Pengelola Kampung Sirih. Adapun proses *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang diperoleh melalui teori Ansell dan Gash (2007) yang terdiri atas kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*) yang terdiri atas, dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses (*trust building*), berbagi pemahaman (*share understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Kondisi awal (Starting Condition): adanya peluang dan potensi yang ada pada ProKlim tersebut untuk dikembangkan dan dikelola. Serta adanya dukungan dari stakeholder terkait yang sudah mendukung program tersebut.

Desain Kelembagaan (Institutional Design), dalam praktik pelaksanaan kolaborasi memiliki aturan dasar yang jelas dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Program Terpadu Kampung Iklim, dan Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) .

Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*), keterlibatan pemimpin terlihat oleh sinergitas dari berbagi aktor serta peran dari *local hero* dalam hal ini ketua RW 03 sebagai penghubung jalannya kolaborasi.

Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*), dalam indikator dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses (*trust building*), berbagi pemahaman (*share understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*) yang sudah dilaksanakan telah berjalan dengan baik, dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance*. Konsep dan Aplikasi Yogyakarta: Deepublish.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).(2017). Road map program kampung iklim (proklam) : gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Kurniawan, I. A., Widianingsih, I., & Wiradinata, S. N. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 105-113.
- Kurniawan, I. A., Azzahra, R. K., Fauziah, N. S., Yusuf, Y., Salsabilla, N., Murodi, A., & Badar, R. (2023). Workshop Kolaborasi Pentahelix dalam Pemulihan Dampak Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 8(1), 33-42.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, April 1). *KLHK Ajak Semua Pihak Sukseskan Pencapaian Target Terbentuknya 20.000 Kampung Iklim*. <https://www.Menlhk.Go.Id/>.
- Nugroho, I., & Hilman, Y. A. (2020). Sinergitas Program *Fantastic!* Ponorogo Dalam Rangka Pembangunan Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 220–229. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.893>.
- Prabowo, A., Khairul Muluk, M. R., Hayat, A. (2021). *Model Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19: Studi di Kabupaten Lampung Selatan. 6(1), 6–7. <https://doi.org/10.26905>.
- Ramdani, J., & Resnawaty, R. (2021). Kolaborasi Multi Pihak Pada Program Kampung Iklim di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kolaborasi Multi Pihak*, 3(2) 191-198.
- Sudarwanto, Suriyanti & Tjoneng, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *In Jurnal Agrotek* (Vol. 4, Issue 2).
- Tri Sambodo, G., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Program Terpadu Kampung Iklim.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).